

**Pembuktian dalam Cerai Ta'liq Talak
(Studi Implementasi Pasal 50 Enakmen
No.5 Tahun 2004 Di Mahkamah Rendah
Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang)**

Khairani

Nuha Binti Nasir

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: khairani@yahoo.com

Abstrak: Cerai ta'liq merupakan satu kaedah perceraian yang telah dibincangkan oleh para ulama sejak sekian lamanya. Cerai ta'liq adalah suatu bentuk perceraian sering dilakukan di Negara Malaysia. Kaedah perceraian ini akan berlaku setelah syarat yang terkandung dalam lafaz ta'liq yang diucapkan oleh suami itu, kemudian terjadi. Tujuan ta'liq talak untuk membela nasib wanita daripada ditindas dan dizalimi oleh suami terutama dalam kasus pengabaian nafkah, mencederakan dan meninggalkan istri dalam tempoh yang agak lama. Hal ini bertepatan dengan implikasi ta'liq memberi kesan besar yaitu perceraian apabila syarat ta'liq tersebut telah berlaku. Seorang istri berhak mendapatkan perceraian ta'liq apabila terbukti suami tersebut telah melanggar perjanjian ta'liq talak sebagai yang diatur dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004. Istri harus mengajukan permohonan tersebut di Mahkamah Rendah Syariah untuk menyelesaikan kasus itu. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui prosedur pembuktian dalam cerai ta'liq talak dalam beberapa kasus yang berada di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu wawancara. Data sekunder diperoleh dari riset dan pustaka dianalisis dengan diskriptif analisis. Ditemukan bahwa pembuktian serta prosedur ta'liq talak dari awal penyelenggaraan pendaftaran sehingga mendapat keputusan daripada mahkamah itu hampir sama dengan perceraian secara biasa dan tidak ada perbedaannya. Saranan yang sesuai untuk dipraktikan berdasarkan pemerhatian adalah membuat suatu perjanjian mengenai pemilikan harta benda bersama suami istri selama perkawinan dan menegaskan lagi hukum dan denda kepada suami yang menzalimi istrinya.

Kata Kunci: Pembuktian , Cerai Ta'liq Talak.

Abstract: *Ta'liq talak is a method of divorce that has been discussed by scholars for many years. A divorce is a form of frequent enlightenment in the state of Malaysia. This method of divorce will take place after the condition contained in the Ta'liq spoken by the husband, then occurs. The purpose of Ta'liq Talak to defend the fate of women rather than be suppressed and wronged by the husband, especially in the case of a living abandonment, injure and leave the wife in a relatively long period. This coincides with the implications of Ta'liq giving a big impression of divorce when the terms of the Ta'liq have occurred. A wife is entitled to a Ta'liq divorce when it is proven that the husband has violated the Treaty of Ta'liq Talak as stipulated in the law of the Islamic State of Penang No. 5 the year 2004. The wife must apply to the sharia lower court to settle the case. The purpose of this research is to know the verification procedure in divorce in some cases that are located at the lower court of Syariah Balik Pulau, Penang. In the discussion of this thesis, the authors used empirical research on the primary data and secondary data. Primary Data is obtained from the research field i.e. interviews. Secondary Data obtained from research and libraries are analyzed with a detailed analysis. It was found that the ta'liq talak proof and procedure from the beginning of the registration process so that the decision of the court was almost the same as the usual divorce and there was no difference. The appropriate suggestion to be practiced based on observation is to make a Treaty on the sorting of the property with husband and wife during marriage and reaffirm the law and fines to the husband who wronged his wife.*

Keywords: *Proof, divorce ta'liq talak.*

PENDAHULUAN

Menurut Hukum Islam pernikahan adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri). Sedangkan menurut pandangan masyarakat, pernikahan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Namun, adakalanya pada masa menjalani bahtera rumahtangga pasangan suami istri dapat mengalami perselisihan, pertengkaran yang sudah tidak lagi didamaikan. Maka

Islam memberi solusi akhir melalui perceraian atau talak. Perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Talak berarti lepas atau bebas (Amir Syarifuddin, 2006: 198). Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, menurut pendapat Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin yaitu:

حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه

Artinya : 'Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya'.

Perceraian yang menjadi penelitian bagi kasus penulis adalah perceraian disebabkan suami melanggar *ta'liq* talak dan tidak sedikit pula yang terjadi karena putusan pengadilan seperti gugat cerai dengan alasan pelanggaran *ta'liq* talak. *Ta'liq* talak ini ialah merupakan talak yang digantungkan pada suatu syarat yang menggunakan huruf-huruf syarat ataupun yang mengandung makna yang seumpama dengannya dan talak itu hanya akan jatuh apabila berlakunya perkara yang *dita'liqkan* itu. Terdapat persamaan diantara talak biasa dengan *ta'liq* talak yaitu darisegi rukun dan syaratnya. Namun terdapat perbezaan diantara talak biasa dengan *ta'liq* talak yaitu hukum bagi talak biasa jatuh secara langsung manakala hukum bagi *ta'liq* talak terjadi saat yang dipersyaratkan telah terjadi.

Setiap pernikahan di Malaysia telah mewajibkan lafaz *ta'liq* yang dibuat sejurus selepas akad nikah. Sudah menjadi kebiasaan di Malaysia yaitu ucapan *ta'liq* (Najibah Mohd Zin, 2007: 121) disebut selepas akad pernikahan di dalam formulir tertentu yang telah disediakan oleh pendaftar dan ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak yaitu suami dan istri. Cerai *ta'liq* hanya boleh dilakukan jika pihak suami ada melafazkan lafaz *ta'liq*. Tujuan *ta'liq* talak adalah usaha dan daya upaya untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar istri tersebut tidak teraniaya, tersia-sia dan tidak sembarangan perbuatan yang dilakukan oleh suami. Bila dilihat dari tujuan tersebut, prosedurnya harus lebih dipercepat atau dipermudahkan sehingga tidak membuat nasib perempuan itu teraniaya.

Berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004, dalam Pasal 50 mendapati seorang istri berhak menggugat perceraian apabila suami telah melanggar perjanjian *ta'liq* talak yang dilakukan selepas menikah serta memenuhi syaratnya maka istri harus mengajukan permohonan ke mahkamah. Penulis telah menjalankan penelitian beberapa kasus berkaitan cerai *ta'liq* ini dan memilih daerah Balik Pulau, Pulau Pinang sebagai lokasi penelitian ini dilakukan. Kasus antara penggugat yang bernama Nor Rahimah Binti Rahim dan tergugat yang bernama Maloja Bin Rasmidin adalah contoh bagi kasus *ta'liq* talak yang berlaku di daerah Balik Pulau. Putusan ini mendapati suami yaitu tergugat telah lama meninggalkan istrinya yaitu penggugat melebihi 4 bulan qamariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ingin penulis meneliti dan mengkaji yaitu bagaimana korelasi antara prosedur gugat cerai *ta'liq* talak dan juga perlindungan

perempuan itu. Selain itu, penulis juga tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan bagaimana metode pembuktian dalam kasus cerai *ta'liq* talak di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang itu terjadi.

Tujuan penulis melakukan penelitian terhadap kasus cerai *ta'liq* ini adalah untuk mengkaji secara terperinci mengenai korelasi prosedur gugat cerai *ta'liq* talak dan perlindungan perempuan serta untuk mengetahui cara pembuktian dalam kasus cerai *ta'liq* talak di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang.

Prosedur Perceraian Di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau dan Kaitannya Dengan Perceraian Ta'liq Talak

Berdasarkan prosedur perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau yaitu dalam Undang-undang Keluarga Islam yang memperuntukkan bahwa prosedur bagi perceraian talak haruslah berlaku di mahkamah saja. Tetapi jika suami mengucapkan talak di luar mahkamah, maka suami tersebut haruslah membuat permohonan bagi mengesahkan perceraian dalam tempoh tujuh hari daripada ucapan tersebut dibuat. Sebelum mengesahkan perceraian yang dibuat di luar mahkamah, hakim haruslah membuat pemeriksaan sebelum menjatuhkan perceraian itu berlaku. Selepas diputuskan perceraian itu berlaku, suami haruslah membuat ucapan talak di hadapan istri.

Prosedur di atas menunjukkan bahwa undang-undang membenarkan suami menceraikan istri di luar mahkamah. Manakala prosedur permohonan cerai secara talak yang berlakukan di dalam mahkamah menurut Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yaitu suami mestilah menghantarkan borang permohonan perceraian bagi mendaftar kasus cerai di Mahkamah dan menetapkan tanggal persidangan. Pihak suami istri haruslah hadir pada tanggal dan masa persidangan yang ditetapkan serta membawa bersama dokumentasi asal bagi Mahkamah mendapatkan persetujuan perceraian suami dan istri. Suami juga perlulah mengucapkan cerai talak satu di persidangan mahkamah untuk mahkamah mengesahkan ucapan cerai suami. Apabila sudah selesai, pihak mahkamah akan mengeluarkan perintah perceraian dan pihak suami dan istri haruslah menerima catatan perceraian tersebut untuk dibawa dengan segera ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai.

Manakala prosedur cerai secara *ta'liq*, penulis mendapati mempunyai kaitan yang sedikit berbeda daripada prosedur cerai biasa yaitu permohonan cerai haruslah daripada pihak istri yaitu pemohon untuk penjatuhan talak atau melalui pengacara yang dilantik. Istri tersebut juga haruslah mendapatkan alamat terakhir suaminya berada dengan tujuan penyerahan surat panggilan. Jika didapati suami tidak dapat menghadirkan diri untuk perbicaraan kasus maka boleh kemukakan surat panggilan gantian. Mahkamah juga boleh meneruskan perbicaraan kes tersebut tanpa kehadiran suami dan seterusnya memutuskan kes tersebut jika dakwaan yang dibuat oleh istri mempunyai asas pembuktian yang kukuh dan diyakini.

Kasus tuntutan *ta'liq* yang dibuat atas alasan ditinggalkan oleh suami atau suami enggan hadir di mahkamah tidak memerlukan masa yang lama untuk diselesaikan. Pihak istri hanya perlu mengubah bentuk serahan surat panggilan

kepada serahan ganti untuk membolehkan mahkamah meneruskan perbicaraan dan seterusnya mensabitkan kasus. Oleh sebab tuntutan *ta'liq* melibatkan beberapa perkara yang berbentuk prosedur adalah menjadi tanggungjawab pihak yang membuat tuntutan yaitu istri.

Pembuktian Perceraian Di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau dalam Islam Terkait dengan Perceraian

Dalam Pasal 8 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 merupakan peruntukan undang-undang dalam kaedah pembuktian dan kesaksian di mahkamah. Penulis mendapati terdapat beberapa peruntukan yang menjadi rujukan dalam proses pembuktian cerai *ta'liq* di mahkamah yang terdapat dalam pasal ini antaranya adalah peruntukkan undang-undang berkaitan *bayyinah* dan *syahadah*, syarat-syarat saksi dan keterangan dengar cakap.

Prinsip *bayyinah* di Malaysia adalah berasaskan kepada tafsiran secara bahasa dan istilah yang telah dinyatakan di atas yaitu *bayyinah* itu istilah umum merangkumi semua kaedah yang boleh menentukan kebenaran atau kepalsuan sesuatu yang dipertikaikan. Dalam Pasal 3 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Pulau Pinang Tahun 2004 menjelaskan *bayyinah* artinya keterangan yang membuktikan sesuatu hak atau kepentingan.

Perkataan *syahadah* dan saksi ditafsirkan oleh Pasal 3 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Pulau Pinang 2004 yaitu artinya apa-apa keterangan yang diberikan di Mahkamah dengan menggunakan ucapan "*asyhadu*" (Al-San'ani, 1996: 204) untuk membuktikan sesuatu hak atau kepentingan. Saksi ini tidak termasuk plaintif, defendan dan orang tertuduh. Namun *syahadah* dan saksi masih terikat dengan syarat-syarat tertentu yang digariskan oleh undang-undang terutama syarat bilangan saksi.

Menurut Seksyen 84 Enakmen 8 Keterangan Mahkamah Syariah Pulau Pinang 2004 membenarkan keterangan saksi bisu atas dasar *bayyinah* dengan syarat keterangan ini hendaklah diberikan dalam mahkamah. Mahkamah Syariah Malaysia juga menerima kesaksian dan keterangan dari ahli keluarga yang terdekat yaitu ibubapa, anak, istri dan suami. Pasal ini menghuraikan keterangan anak terhadap ibu bapanya boleh diterima sebagai *syahadah* atau *bayyinah*. Akan tetapi keterangan ibu bapa yang menyokong dakwaan anaknya akan diterima sebagai *bayyinah* saja karena dianggap mempunyai kepentingan daripada hubungan tersebut. Hal demikian itu, membuktikan bahwa kesaksian suami, istri, ibubapa dan anak diterima sebagai *syahadah* dan *bayyinah*. Apabila keterangan dari pihak suami, istri, ibubapa dan anak didapati menyokong terhadap pihak yang terdakwa maka kesaksian tersebut hanya diterima sebagai *bayyinah* saja.

Berdasarkan pandangan ulama, syarat-syarat saksi menurut al-Nawawiyy yaitu beragama Islam, merdeka, mukallaf, adil menjaga maruah dan tidak ada tohmahan. Syarat beragama Islam, dewasa dan berakal telah diterima secara ijma' oleh ulama. Mazhab Syafi'i tidak membedakan *bayyinah* dan *syahadah* maka

dalam semua keadaan di atas, saksi dikatakan memberikan *syahadah*. Terdapat juga pandangan mazhab ini yang menepati maksud *bayyinah* dalam undang-undang seperti keterangan antara anak terhadap ibu bapa bagi faedah atau menentang pihak satu lagi. Kesaksian suami istri adalah diterima untuk faedah atau menentang pihak yang satu lagi. Pendapat Imam Syafi'i dan ulama besar dalam mazhab ini tidak menerima kesaksian bukan Islam, anak-anak, orang fasik serta orang yang tidak menjaga maruah.

Menurut mazhab Syafi'i kesaksian dengar cakap atau *al-syahadah 'ala al-syahadah* secara umumnya diterima dalam kasus kehartaan dan kasus jenayah. Kesaksian atas kesaksian bermakna saksi yang hadir ke mahkamah bukan saksi yang mendapat maklumat itu secara langsung tetapi diperolehi melalui saksi asal yang sebenarnya menyaksikan apa yang berlaku. Pada prinsipnya kesaksian jenis ini tidak diterima kerana tidak wujud keterangan langsung. Menurut Mazhab Syafi'i, kesaksian ini boleh berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu serta bersyarat.

Secara prinsipnya keterangan lisan yang diberikan oleh saksi haruslah secara langsung. Peruntukkan berkaitan keterangan langsung disebut dalam Pasal 47 (1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Pulau Pinang Tahun 2004. Keterangan langsung bermakna jika fakta itu boleh dilihat maka keterangan saksi telah melihat fakta itu. Selain itu, bagi fakta yang boleh didengar atau ditanggapi dengan pancaindera lain, maka keterangan haruslah diberikan oleh orang yang mendengar atau orang yang menanggapi fakta itu.

Dalam konteks undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Pulau Pinang, perkataan *qarinah* ditafsirkan artinya fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta yang satu lagi dengan apa-apa cara yang disebut dalam enakmen ini. Kebanyakan ulama memasukkan *qarinah* sebagai salah satu bentuk keterangan yang boleh membuktikan sesuatu fakta. Konsep *qarinah* dalam undang-undang keterangan Mahkamah Syariah di Malaysia telah diterima sebagai sama dengan konsep fakta berkaitan (*relevant fact*) di dalam undang-undang Sivil (Akta Keterangan 1950). Sehubungan dengan itu perkataan *qarinah* telah dimasukkan ke dalam Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah menggantikan perkataan fakta berkaitan.

KAJIAN TEORI

Pengertian, Dasar Hukum Ta'liq Talak dan Isi Perjanjiannya

Pengertian ucapan *ta'liq* yaitu menggantungkan daripada berlakunya sesuatu perkara dengan syarat-syarat yang ditentukan sebelumnya. Menurut Imam al-Nawawiyy bahwa ucapan *ta'liq* adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami yang bertujuan untuk menceraikan istri dengan menggunakan perkataan seperti siapa, jika, apabila dan manakala. Contohnya ucapan suami terhadap istrinya "jika awak keluar dari rumah ini tanpa izin saya, maka awak diceraikan". Berdasarkan

contoh itu, sekiranya istri melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh suami maka perceraian akan berlaku.

Imam al-Zuhayliy berpandangan bahwa cerai *ta'liq* mempunyai 2 jenis syarat yang boleh *dita'liqkan* oleh seorang suami yaitu suatu syarat yang mampu diusahakan dan dalam bidang kuasa yaitu dari ucapan suami seperti “sekiranya aku memasuki rumah si polan maka terceraillah istriku” atau dari ucapan istri seperti “sekiranya engkau memasuki rumah si polan maka terceraillah engkau”. Manakala syarat kedua adalah syarat perbuatan di luar kemampuan manusia untuk melakukannya kecuali kehendak Allah SWT seperti terbit matahari, kematian atau kelahiran seseorang. Menurut al-Zuhayliy lagi, cerai *ta'liq* yang telah diucapkan oleh suami tidak boleh ditarik balik seperti ucapan cerai biasa. Ini berarti cerai *ta'liq* dan cerai biasa adalah sama cuma perbedaannya adalah cerai biasa berlaku secara langsung manakala cerai *ta'liq* pula berlaku secara tergantung. Hukum bagi cerai *ta'liq* adalah harus *dita'liqkan* dengan sesuatu syarat yang diketahui akan berlaku atau berkemungkinan akan berlaku.

Di Malaysia, amalan mengucapkan cerai *ta'liq* adalah amalan biasa yang dilakukan oleh suami selepas akad nikah. Amalan ini juga bukan perkara yang diwajibkan dalam syariat Islam tetapi ia tetap dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa agama di Malaysia sebagai tuntutan bagi menjamin keharmonian rumahtangga pasangan yang bernikah.

Para fuqaha' telah berselisih pendapat dalam memberikan pendapat dalam permasalahan ini, yaitu seperti jatuh talak itu ataupun tidak. Pendapat mereka ini dapat dibagikan dalam tiga golongan. Pendapat yang digunakan dan menjadi asas kepada keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan pada tanggal 1 Januari 1999 adalah pendapat jumhur fuqaha' yang terdiri daripada imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, hukum perceraian secara ta'liq adalah harus dan jatuh talak apabila berlaku perkara yang *dita'liqkan*.

Isi perjanjian ucapan *ta'liq* yang diamalkan pada masa sekarang adalah berkuat kuasa pada 1 Jun 2005. Ucapan ta'liq yang diamalkan di setiap negeri di Malaysia yaitu dalam akta nikah adalah '*apabila saya tinggalkan istri saya (nama istri) selama empat bulan Qamariah berturut-turut atau lebih sama ada dengan sengaja atau dengan paksa; atau jika saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama empat bulan Qamariah berturut-turut atau lebih sedangkan dia taat kepada saya atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya atau menyebabkan penganiayaan atau sebarang Darar Syarie dan kemudiannya dia mengadu kepada mahkamah syariah dan jika sabit aduannya di sisi hukum syarie, dan dia memberikan kepada mahkamah syariah untuk menerima RM 10 bagi pihak saya maka pada ketika itu tertalakah dia dengan talak khulu'*. Ucapan *ta'liq* ini telah diselaraskan oleh Jabatan Agama Islam seluruh negara dengan memasukkan talak khulu' dengan unsur *ta'liq* yang jelas dan mudah difahami. Isi perjanjian ini telah digariskan oleh para ulama dan telah disepakati bahwa istri boleh memohon cerai *ta'liq* daripada pihak mahkamah apabila ditinggalkan secara langsung, tidak diberikan nafkah dan dianyai oleh suaminya.

Tujuan Ta'liq Talak

Tujuan *ta'liq* talak yaitu usaha dan daya upaya untuk melindungi wanita atau istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar istri tersebut tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku dari suami itu. Dengan adanya *ta'liq* talak ini, nasib istri dan kedudukannya menjadi lebih terbela dan terhormat di sisi Islam seperti mana saranan Nabi Muhammad S.A.W pernah bersabda di khutbah terakhir yang menyarankan untuk sentiasa memuliakan kaum wanita dan berbuat baik kepada mereka.

Ta'liq talak ini juga merupakan suatu bentuk jaminan dari suami jika perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik dan mencapai sakinah, mawaddah warahmah. Jika suami tersebut mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga dan mengucapkan ucapan *ta'liq* diawal pernikahannya maka istri tersebut dapat mengadukan kepada Hakim supaya perkawinannya dibubarkan atau diputuskan. Hakim pula dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.

Dalam pada itu, dengan membaca *ta'liq* talak maka suami telah berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab kerna setiap perkawinan juga, jika diteliti tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup dengan penuh harmoni dan saling melengkapi. Namun adakalanya, harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia dan diidam-idamkan berubah menjadi neraka, maka terbukalah pintu perceraian sebagai jalan keluar daripada segala kekusutan kehidupan. Kerana awal dari perkawinan adalah cinta kasih sayang yang membayangkan kebahagiaan maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi yang sebaliknya, benci dan dendam. Hal ini demikian kerana, kasus perceraian merupakan perkara yang paling sulit ditangani hakim.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau

Penulis melakukan penelitian di salah satu daerah dalam negeri Pulau Pinang yaitu Daerah Barat Daya. Dari sudut pentadbiran undang-undang, Negeri Pulau Pinang memiliki badan-badan yang mentadbir undang-undang negeri dan badan tersebut digelar sebagai Badan Kehakiman dan terdapat dua bentuk pentadbiran mahkamah yaitu Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah di Negeri Pulau Pinang didirikan atas desakan para penasehat agama, para ulama dan masyarakat Pulau Pinang. Mahkamah Rendah Syariah yang penulis bahas di sini adalah Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang juga ditubuhkan dan ditadbir bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JAIPP). Begitulah juga Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau (MRSBP) ditadbir bersama Pejabat Agama Daerah Balik Pulau. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah

membentuk Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang untuk menggantikan Mahkamah Qadhi (Amalina, 2018).

Mahkamah Rendah Syariah yang berwenang untuk menangani masalah yang berlaku di wilayah yang bersangkutan saja yaitu menguruskan kebanyakan kesalahan yang melibatkan akidah, sosial dan didalam pelaksanaan rukun Islam. Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang berfungsi serta berperanan besar dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, memberi keadilan dan menyelesaikan berbagai masalah rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat di daerah tersebut.

Setiap wilayah Negeri Pulau Pinang didirikan Mahkamah Rendah pada 5 kabupaten yaitu Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya, Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Utara, Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah dan Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Selatan.

Mahkamah ini telah diberikan bidang kuasa untuk membubarkan perkawinan. Mahkamah hanya mempunyai kuasa untuk membubarkan sebarang perkawinan yang telah didaftarkan yaitu perkawinan tiap-tiap orang yang bermastautin di Negeri Pulau Pinang dan perkawinan tiap-tiap orang yang tinggal diluar Negeri Pulau Pinang hendaklah didaftarkan mengikut enakmen ini selepas tanggal yang ditetapkan.

Kasus-kasus Perceraian Ta'liq Talak

Penulis telah membawakan beberapa contoh kasus- kasus cerai *ta'liq* yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang. Kasus pertama adalah diantara Nor Rahimah Binti Rahim dan lawannya Maloja Bin Rasmidin yaitu suaminya yang meninggalkan istrinya melebihi 4 bulan qamariah tanpa memberikan sebarang nafkah zahir dan batin kepada istrinya. Lebih parah lagi, permohonan cerai *ta'liq* yang dilakukan oleh penggugat di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau adalah selepas 6 tahun lamanya penggugat di tinggalkan oleh suaminya.

Hal ini demikian, telah memberikan tekanan hidup dan gangguan emosi kepada penggugat. Pihak penggugat memohon pembubaran perkahwinan pada pada tanggal kasus ini difailkan 23 Mac 2016 atas alasan tergugat telah melanggar *ta'liq* yang dilafazkan olehnya pada hari pernikahan tanggal 8 Ogos 1999 Persidangan tersebut yang telah berlangsung pada tanggal 12 April 2016 dengan kehadiran penggugat berserta saksi-saksi dan juga kehadiran tergugat. Atas bukti yang kuat oleh pihak penggugat mahkamah memutuskan dan memberikan perintah membubarkan perkahwinan para pihak dengan talak satu.

Kasus kedua adalah diantara Wahidah Bt Mohamad dan lawannya Ramli Bin Che Husin yang telah berkahwin pada 30 Jun 1980 dan menetap di rumah ibu penggugat di Pulau Pinang. Selepas tergugat dapat bertukar kerja ke Sungai Petani, Kedah, beliau berpindah ke Sungai Petani tanpa membawa penggugat tinggal bersamanya di sana. Dalam bulan Disember tahun 1986 hingga tahun 1990,

tidak ada sebarang berita yang diterima dari tergugat dan nafkah juga tidak diberikan kepada penggugat. Pada masa bernikah dahulu tergugat ada membaca lafaq *ta'liq*.

Penggugat melakukan permohonan pembubaran perkahwinan atas sebab bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat lebih 4 bulan qamariah. Dalam persidangan, penggugat telah berjaya meyakinkan mahkamah dengan keterangan dari 3 orang saksi dan seorang pengacara manakala tergugat hanya membawa seorang saksi dari kalangan ahli keluarganya sendiri dan seorang pengacara. Mahkamah mendengar dan mengambil keterangan dari pihak penggugat saja dan menolak keterangan dari pihak tergugat karena pihak tergugat membawa seorang saksi yang lemah dan keterangan yang diberikan tidak kuat untuk dijadikan bahan bukti. Mahkamah telah menjatuhkan kasus ini dengan tertalakhlah istri tersebut dengan talak satu.

Prosedur Perceraian Ta'liq Talak

Bagi prosedur perceraian kasus yang diteliti penulis yaitu pada tanggal 23 Mac 2016 Nor Rahimah Binti Rahim (penggugat) telah membuat permohonan perceraian secara *ta'liq* dan mahkamah mengeluarkan surat panggilan terhadap Maloja Bin Rasmidin (tergugat). Penggugat juga telah membayar uang pendaftaran untuk mendaftar dan mahkamah menetapkan tanggal dan masa untuk para pihak hadir ke mahkamah untuk perbincaraan. Pada tanggal 12 April 2016 penggugat dan tergugat telah hadir dalam persidangan kasus itu. Penggugat juga telah memberi keterangan, mengemukakan saksi dan mengemukakan dokumentasi sokongan serta mengemukakan hujah tersebut secara bertulis.

Keputusan yang diberikan oleh hakim adalah berdasarkan penerangan dan pembuktian para pihak. Mahkamah telah mengeluarkan perintah perceraian dengan tertalakhlah penggugat dengan talak satu dan pihak penggugat dan tergugat menerima catatan perceraian yang dikeluarkan oleh mahkamah untuk diserahkan kepada Jabatan Agama Islam bagi urusan mengeluarkan sijil cerai kepada penggugat dan tergugat sebagai dokumentasi pendaftaran cerai telah berlaku.

Metode Pembuktian Dalam Cerai Ta'liq Talak

Para fuqaha telah membincangkan tentang pembuktian dengan panjang sekali dalam kasus cerai *ta'liq* tetapi dapat disimpulkan bahwa pihak yang mendakwa (istri) hendaklah membuktikan dakwaannya dengan kuat, jika tidak dakwaannya akan ditolak. Berdasarkan kasus Nor Rahimah Binti Rahim dengan Maloja Bin Rasmidin sepanjang perbincaraan, penggugat mempunyai pembuktiaan yang kuat karena telah memanggil dua orang saksi dan seorang pengacara. Manakala tergugat pula mempunyai alasan yang lemah kerna tidak mempunyai saksi dan pengacara. Mahkamah meluluskan permohonan penggugat dan telah menjatuhkan talak satu atas penggugat dan tergugat. Kasus ini selesai selama 1

tahun 7 bulan karena kasus ini menggunakan asas sederhana yaitu jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

Pembuktian yang digunakan dalam kasus cerai *ta'liq* adalah pembuktian secara *syahadah* saja, *syahadah* dan *bayyinah* atau *bayyinah* saja. Kaedah pembuktian secara *syahadah* adalah menggunakan ucapan kesaksian dalam majelis kehakiman untuk kepentingan orang keatas orang lain. Manakala *bayyinah* pula adalah dengan mengemukakan dalil-dalil atau hujah-hujah dan pandangan mazhab-mazhab secara ringkas dengan menggunakan Undang-undang Keterangan Islam. Kebanyakan kesaksian *syahadah* melibatkan saksi dalam kalangan saudara mara, rakan dan jiran terdekat yang mengetahui atau menyaksikan secara langsung penderitaan yang dialami oleh penggugat (istri). Manakala kaedah pembuktian *bayyinah* pula melibatkan kesaksian daripada ibu bapa, anak, majikan, jiran atau rakan yang menyedari secara tidak langsung atau sekadar dengar cakap tentang penderitaan yang dialami oleh penggugat (istri).

Pembuktian kasus tinggal langsung adalah perceraian *ta'liq* yang paling banyak dituntut oleh istri di mahkamah syariah. Pembuktian secara *syahadah* dan *bayyinah* merupakan kaedah pembuktian yang sering berlaku dan digunakan dalam perceraian ta'liq ini. Selain itu, kasus yang melibatkan suami hilang (*ghaib*), kebiasaannya mahkamah telah mengeluarkan surat panggilan serta waran tangkap namun tidak dapat disampaikan kepada tergugat karena tidak dapat diketahui dimana tergugat berada. Terdapat juga kasus suami yang meninggalkan istrinya akibat dipenjarakan.

Pembuktian kasus mencederakan istri adalah pembuktian secara *bayyinah* mencapai bilangan tertinggi. Kasus ini disebabkan kesukaran penggugat untuk mendapatkan saksi pada tahap *syahadah* seperti saksi yang melihat sendiri pergaduhan dan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat. Tergugat menyakiti tubuh badan atau memudaratkan istri kebiasaannya dituntut apabila berlakunya kekejaman keatas istrinya atau mencederakan istri atau dengan cara apa sekalipun. Pada kebiasaannya istri akan mengemukakan laporan perubatan serta laporan polisi sebagai bahan bukti bagi menguatkan lagi keterangannya. Perbicaraan kasus ini akan menjadi mudah apabila istri membuat dakwaan terhadap suaminya yang telah melanggar *ta'liq* karena mencederakan dan diakui sendiri oleh suami secara sadar atau tidak. Perbicaraan kasus akan berpanjangan apabila suami yang tidak mengakui perbuatannya yang mencederakan istri dan istrinya juga tidak dapat membuktikan laporan perubatan bagi menguatkan lagi dakwaannya.

Pembuktian kasus yang tidak memberikan nafkah kepada penggugat, kasus ini menggunakan kaedah pembuktian secara *syahadah* dan ini membuktikan bahwa penggugat tidak terlalu sukar untuk mendapatkan saksi secara *syahadah* dalam kasus cerai *ta'liq* akibat suami tidak memberikan nafkah. Kasus tidak memberikan nafkah adalah kasus dimana istri tidak diberikan nafkah oleh suami melebihi tempoh yang dilafazkannya dalam *ta'liq* selepas akad nikah.

Dalam kasus pembuktian *ta'liq* talak ini bahwa pembuktian bagi pihak penggugat lebih kuat dan lebih diyakini apabila penggugat membawa hujah-hujah keterangan utama daripada *syahadah* dan *bayyinah*. Kelebihan *ta'liq* talak yang

dilafazkan ketika akad pernikahan kelihatan lebih menguntungkan pihak perempuan serta menjamin keselamatan dan hak-hak perempuan itu sendiri. Hal demikian ini, selari seperti diperuntukkan di dalam undang-undang perlindungan perempuan yang dipraktikkan sehingga kini.

Korelasi Prosedur Gugat Disebabkan Ta'liq Talak dengan Perlindungan Perempuan

Setiap wanita mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang yaitu Undang-undang Perlindungan Perempuan. Dalam undang-undang perlindungan perempuan, terdapat hak-hak asasi yang tertentu. Hak Asasi Perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.

Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) telah mendeklarasikan hak-hak yang bagi perlindungan perempuan adalah hak atas persamaan, kebebasan dan keamanan setiap wanita. Selain daripada itu, terdapat hak-hak yang penting dan diberi perhatian yaitu hak-hak daripada dizalimi terhadap perempuan pada kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat wanita serta hak untuk memilih pasangan hidup dan hak memiliki harta sendiri saat perceraian terjadi.

Di Malaysia akta yang melindungi wanita terbahagi kepada beberapa bahagian antaranya adalah Akta 164 yaitu Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976. Kompetensi perceraian sepenuhnya berada di tangan hakim manakala pengadilan pula adalah satu-satunya forum yang dapat memenuhi permohonan cerai dan mengesahkan pembubaran mahligai perkawinan. Banyaknya perceraian di luar sana disebabkan kelalaian suami terhadap istri dalam hal pengurusan, pemberian nafkah, dan penghargaan terhadap istrinya. Dalam hal inilah tampak akan fungsi *ta'liq* talak yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap istrinya.

Pelanggaran suami terhadap hal-hal seperti ucapan *ta'liq* talak merupakan alasan bagi istri untuk mengajukan keberatan dan menuntut dijatuhkannya talak. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Perempuan yang didapati terdapat kolerasi yang sangar rapat antara prosedur gugat disebabkan *ta'liq* talak dengan perlindungan perempuan. Kolerasi yang jelas adalah tujuan prosedur gugat disebabkan *ta'liq* talak berlaku adalah semata-mata untuk melindungi hak-hak istri daripada terus dizalimi oleh suami yang dengan meninggalkan isteri melebihi empat bulan hijrah atau lebih dengan sengaja atau paksaan atau tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya atau menggunakan kekerasan dengan memukul atau mendera isterinya.

Dengan terikatnya *ta'liq* talak ini, maka dengan ini mampu memberi ruang kepada istri untuk bersuara dan memberi keamanan serta perlindungan kepada istri dengan mengajukan perceraian *ta'liq* kepada pihak mahkamah serta mengambil tindakan sewajarnya. Makanya, prosedur gugat *ta'liq* talak ternyata mempunyai

kolerasi yang jelas dan amat rapat dengan Undang-undang Perlindungan Perempuan.

KESIMPULAN

Prosedur gugat cerai *ta'liq* talak itu bukanlah mudah untuk hakim menjatuhkan talak karena hakim perlu mendengar dan meneliti secara jelas terhadap bahan-bahan bukti dan saksi-saksi yang sah bagi memberikan kata putus yang adil samaada pihak suami tersebut benar-benar melakukan perkara yang dita'liqkan atau tidak melakukannya. Dalam kasus cerai *ta'liq* talak di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang ini, tidak ada perbedaannya talak biasa maupun talak secara *ta'liq* dari awal penyelenggaraan pendaftaran sehingga mendapatkan keputusan daripada mahkamah. Untuk pembuktian pula, cerai secara biasa dan cerai secara *ta'liq* juga kelihatan hampir sama dan tidak ada perbedaannya.

Adapun pembuktian kesaksian daripada ahli keluarga, didapati pembuktian cerai *ta'liq* talak dengan pembuktian kasus-kasus lain dimana kesaksian itu di bawa oleh ahli keluarga pendakwa. Dengan demikian, prosedur pembuktian di Malaysia adalah lebih mudah dan menguntungkan pihak istri bagi melindungi hak-hak daripada terus dizalimi. Selanjutnya putusan hakim, rata-rata tuntutan gugatan cerai *ta'liq* adalah dimakbulkan oleh pihak mahkamah dan jarang sekali yang tidak dikabulkan

SARAN

Prosedur kasus *ta'liq* talak di Pulau Pinang, terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu di atasi demi kepentingan perlindungan kaum perempuan. Penulis mensarankan secara khusus kepada aturan di Negeri Pulau Pinang dipilih melalui Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004 seharusnya menggubalkan suatu Perjanjian Perkahwinan yaitu suatu perjanjian mengenai pemilikan harta benda bersama suami istri selama perkahwinan mereka bagi menjamin kelangsungan istri sekiranya terjadi perceraian atau pembubaran pernikahan. Perjanjian seperti itu harus diadakan sebelum dilangsungkan perkahwinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkahwinan kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan ketiga.

Para pemangku pembuat aturan di Pulau Pinang yaitu Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau agar lebih memperhatikan secara tegas atas hukuman serta denda terhadap suami yang meninggalkan istri secara langsung, mencederakan istri dan mengabaikan tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu denda sekurang-kurangnya RM 3000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau penjara dua tahun atau kedua-duanya sekali bagi mengelakkan sebarang pengabaian hak-hak yang wajib diterima oleh istri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Jilid. 4., Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Indonesia : Kencana, 2006.

Diakses melalui http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1-/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/e5f7743ba25d31af4825713900066b0b? Open Document pada tanggal 2 Disember 2018

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, *Carta Aliran Proses Perceraian Di Mahkamah Syariah*.

Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam)*, Jilid 14, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2007.